

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang Disabilitas sendiri memiliki beberapa kriteria tertentu seperti mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja pada kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas fisik (tubuh, netra, rungu wicara), penyandang disabilitas mental (mental retardasi dan eks psikotik), penyandang disabilitas fisik dan mental / disabilitas ganda. Dengan adanya berbagai kriteria yang dapat memberatkan penyandang disabilitas ini, bahkan dapat menghambat mereka untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari, maka dari itu untuk membantu meringankan beban mereka maka diadakanlah kegiatan rehabilitas sosial terpadu dengan tujuan dapat membantu memulihkan kembali fungsi sosial mereka yang sempat terhambat.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat (Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial). Adapun tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah untuk memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terpadu ini adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ditugaskan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat. Salah satu Program kerja mereka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut yaitu melalui Rehabilitasi Sosial yang dalam penanganan masalah penyandang disabilitas dimaksud, Dinas Sosial membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas penyandang disabilitas melalui optimalisasi Rehabilitasi Sosial Terpadu dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilayani dan dibina sehingga berdaya guna dengan memulihkan kembali kemampuan dan fungsi sosial dari penyandang disabilitas yang sebelumnya sempat terhambat melalui kerjasama dengan tenaga medis, psikolog dan berbagai sektor lainnya.

Dikutip dari “Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Terpadu Penanganan Disabilitas”, dalam implementasinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki beberapa standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh calon penerima reabilitasi seperti pemenuhan persyaratan (mengajukan permohonan, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, *fotocopy* KTP sebanyak 3 lembar, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, hingga Surat Keterangan Dokter), adapun prosedur yang harus diikuti, yaitu menerima dan surat dan mengikuti agenda, memberikan disposisi surat kepada Bidang Rehabilitasi Sosial, melakukan wawancara atau *asesmen* kepada penyandang disabilitas dan orangtua penyandang disabilitas, hingga memeriksa persyaratan dan mengonsep surat rekomendasi sesuai dengan blanko yang telah ada, dan proses pengelolaan pengaduan yang akan dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial didapatkan informasi bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ini biasanya diadakan 5 hingga 6 kali periode disetiap tahunnya dengan rata-rata pendaftar disabilitas yang melebihi kuota bantuan yang disediakan. Melihat adanya kelebihan kapasitas data pemohon yang akan mengajukan persyaratan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial terpadu yang melibatkan

banyak komponen atau kriteria yang akan dinilai (multi kriteria) sehingga dapat menimbulkan permasalahan seperti kerugian yang dialami bagi penyandang disabilitas yang seharusnya diprioritaskan menerima rehabilitasi sosial pada periode waktu tersebut namun tidak diprioritaskan dan harus menunggu periode selanjutnya agar memiliki peluang untuk menerima bantuan rehabilitasi. Selain itu, apabila data-data atau kriteria yang akan dinilai tersebut jika masih diproses secara manual akan memakan waktu yang cukup lama dan masih memiliki potensi menimbulkan terjadinya kesalahan dalam memproses informasi sehingga mempengaruhi hasil kelayakan apakah penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan layak atau tidak untuk menerima rehabilitasi sosial terpadu tersebut. Untuk membantu Dinas Sosial dalam memilih kelayakan penyandang disabilitas menerima rehabilitasi sosial sesuai kriteria yang diinginkan dengan efektif dan efisien maka dibangunlah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki (Artika, 2013). menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Metode ini dapat mendukung penyelesaian masalah penentuan kelayakan pemberian Rehabilitasi Sosial Terpadu dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria menggunakan perhitungan sederhana dan mudah untuk diterapkan dalam kasus yang memiliki unsur subjektivitas yang tinggi, sehingga dapat diperoleh nilai terbesar yang dapat dipilih sebagai alternatif terbaik.

Untuk mendukung penelitian ini maka diambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tri Andika Buheli, dkk. (2020), penelitian tentang Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan

Bantuan Nelayan dan Pembudidaya Menggunakan Metode AHP”. Pada jurnal tersebut menggunakan beberapa kriteria seperti status penduduk, pekerjaan, tanggungan keluarga, pendidikan terakhir, dan penghasilan. Penelitian ini telah menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Kepada Nelayan dan Pembudidaya Menggunakan Metode AHP. Pembangunan sistem ini terdiri dari tahapan penginputan data penduduk, kriteria, sub kriteria dan periode. Tahapan proses perbandingan antar kriteria, sub kriteria dan perbandingan alternatif. Tahapan terakhir menghasilkan penilaian alternatif, sehingga sistem ini mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penentuan penerimaan bantuan kepada nelayan dan pembudidaya serta menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada prioritas dengan kriteria yang ditentukan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Heni Ayu Septilia, dkk. (2020), yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Dana Bantuan Menggunakan Metode AHP”. Berdasarkan masalah yang ada pada Desa Sukabumi, maka dalam penelitian ini akan di kembangkan sistem pendukung keputusan untuk pemberian dana bagi masyarakat kurang mampu menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang nantinya dapat mendukung dalam penentuan bantuan untuk masyarakat. Kriteria yang digunakan dalam pemberian dana PKH yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status, umur, tempat tinggal, kesehatan, dan jumlah anak. Dalam implementasinya sistem dapat melakukan pembobotan perbandingan berpasangan dengan menginputkan data masyarakat yang akan dilakukan penilaian dengan cara menilai atau memilih secara ceklis pembobotan kriteria dan pembobotan alternatif setelah itu sistem dapat menampilkan secara otomatis nilai perbandingan alternatif, nilai konsentrasi apakah layak dalam penilaian, dan menampilkan hasil akhir penilaian yaitu perengkingan penilaian masyarakat yang pantas mendapatkan dana bantuan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lia Mazia, dkk. (2021), yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)”. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pihak yang memberikan bantuan diantara

nya adalah kondisi kerusakan fisik bangunan, ekonomi kepala keluarga, dan kelengkapan berkas-berkas pengajuan. Dari hasil perhitungan menggunakan metode AHP didapatkan Kriteria yang paling berpengaruh adalah Kriteria Kerusakan Fisik Bangunan karena mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0.4898 atau 49%, kemudian Kriteria yang kedua adalah Kriteria Ekonomi dengan nilai 0.3074 atau 31% dan yang terakhir yaitu Kriteria Kelengkapan Berkas dengan jumlah nilai 0.2027 atau 20%.

Dari beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan, maka peneliti menemukan perbedaan penelitian yang dapat dilihat dari sudut pandang penelitian ini yang akan memfokuskan kepada kriteria dan kondisi penyandang disabilitas yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berhak menerima rehabilitasi sosial berdasarkan alternatif terbaik yang didapatkan melalui Sistem Pendukung Keputusan dengan menerapkan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Maka dari itu dilakukanlah penelitian dengan judul “Penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Untuk Membangun Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Sasaran Rehabilitasi Sosial Terpadu Bagi Penyandang Disabilitas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan untuk merekomendasikan penerima rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas yang terdata pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggunakan analisis metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan Batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu:

1. Data *sample* yang diolah berasal dari data penyandang disabilitas yaitu data BNBA (*By Name By Adress*) Penerima Manfaat Lembaga Kesejahteraan

Sosial Disabilitas yang terdaftar pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

2. Kriteria dari penyandang disabilitas yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah jenis disabilitas, derajat kecacatan, kelompok usia, identitas / status sosial, dan kelengkapan berkas pendaftaran.
3. Alternatif yang dijadikan dalam penentuan sasaran rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas ini yaitu penyandang disabilitas yang mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai, penyandang disabilitas fisik (tubuh, netra, rungu wicara), penyandang disabilitas mental (mental retardasi dan eks psikotik), dan penyandang disabilitas fisik dan mental / disabilitas ganda.
4. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan XAMPP sebagai server lokal, dan mySql sebagai basis datanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan dengan menentukan alternatif terbaik yang didapatkan dari perhitungan menggunakan metode AHP yang akan memfokuskan kepada kriteria dan kondisi penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat membantu Dinas Sosial dalam menentukan apakah penyandang disabilitas tersebut berhak menerima rehabilitasi sosial atau tidak berdasarkan kriteria atau tingkat disabilitas yang diderita.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan ini dapat membantu pihak instansi dalam mengambil keputusan untuk menentukan penyandang disabilitas manakah yang layak untuk diprioritaskan terlebih dahulu dalam menerima rehabilitasi sosial terpadu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat memaksimalkan fungsi kebijakan dan

calon penerima rehabilitas ini menjadi lebih tepat sasaran berdasarkan kriteria atau tingkat disabilitas yang diderita.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan informasi pendukung yang diterapkan dalam penelitian.

Bab III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, metode perancangan SPK, metode pengembangan sistem, *flowchart* penelitian, dan jadwal penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV: ANALISIS SISTEM DAN PERANCANGAN

Bab ini berisikan uraian pemodelan sistem, perancangan dari sistem yang akan dibangun, hingga kebutuhan informasi dan sumber data yang diperlukan dalam pembangunan Sistem Pendukung Keputusan.

Bab V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisikan implementasi dari sistem dalam bentuk *codingan* serta melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun dan siap untuk digunakan.

Bab VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dalam pembangunan Sistem Pendukung Keputusan menentukan Sasaran Rehabilitasi.